

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa ekonom menganggap keberlanjutan adalah tentang pemeliharaan dan peningkatan standar hidup manusia. Berbagai organisasi dan lembaga telah berpartisipasi dalam menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan, salah satu yang terbesar adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak didirikan, PBB telah aktif di bidang pembangunan berkelanjutan dengan mengorganisir berbagai konferensi, mengambil tindakan, dan menerbitkan berbagai publikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, Divisi Pengadaan PBB memperkenalkan serangkaian 17 tujuan global yang disusun menjadi 169 target yang akan dicapai untuk mengadopsi Agenda 2030 yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs dibuat untuk menghasilkan serangkaian tujuan universal yang memenuhi tantangan lingkungan, politik dan ekonomi yang mendesak. Dalam hal ini, Indonesia mengambil peran dengan mengimplementasikan strategi untuk mencapai SDGs dengan perencanaan dan penganggaran pemenuhan kebutuhan manajemen sumber daya alam yang memadai dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai upaya peralihan menuju ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga

Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa perusahaan harus menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Keuangan berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Damayanti & Hardiningsih, 2021).

Kondisi industri global yang terus berkembang membuat laju perekonomian Indonesia juga berkembang. Namun, kemajuan ekonomi juga diiringi kemunduran dari berbagai aspek, misalnya berkaitan dengan proyek pembangunan kereta cepat. Dibalik kemegahan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini terdapat beberapa kontroversi. Perizinan lingkungan dari KCJB yang tampaknya terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW hanya menghasilkan lisensi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencatat ada 23 kasus terkait langsung dengan proyek kereta cepat Indonesia-China.¹ Selain itu, akibat pembangunan terowongan pada Oktober 2019, puluhan rumah rusak berat hingga ringan. Selain itu, berdasarkan hasil kajian Badan Geologi, telah terjadi retakan tanah memanjang di area kompleks yang dapat menyebabkan saat turun hujan, air akan masuk ke dalam retakan tanah dan berpotensi pada bencana longsor. Kasus lain terkait permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang masih terjadi hingga

¹ “Walhi: 133 KK Terdampak Kereta Cepat,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014161950-20-707882/walhi-133-kk-terdampak-kereta-cepat-puluhan-rumah-rusak>

saat ini adalah konflik senjata di Papua. Konflik ini terjadi karena adanya faktor dari perebutan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di tanah Papua. Pasalnya, di Intan Jaya sendiri adalah daerah yang memiliki potensi tambang emas yang sangat tinggi. Area ini merupakan lahan bekas PT Freeport yang belum sempat terjamah kandungannya. Kasus semakin memanas saat adanya rencana penambangan Blok Wabu yang akan dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Hal ini menjadikan konflik bersenjata di Papua semakin meningkat².

Adanya berbagai kasus yang terjadi antara perusahaan dengan hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan mengidentifikasi bahwa masih rendahnya perhatian dari pemilik usaha terhadap dampak yang ditimbulkan dari usahanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam melindungi lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Wahyudi, 2021). Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, laporan berkelanjutan (*sustainability report*) hadir untuk menjadi solusi dari kebutuhan akan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Astuti & Putri, 2019). *Sustainability report* diyakini perusahaan dapat mendapatkan kepercayaan lebih dari stakeholder dan mempererat kerjasama antara perusahaan dan stakeholder demi kelangsungan hidup jangka panjang antara stakeholder dan perusahaan.

² “Fakta Dan Penyebab Konflik Senjata TNI Dan KKB Papua Yang Tak Kunjung Usai,” <https://www.kompas.tv/article/154077/terungkap-inideretan-fakta-penyebab-konflik-senjata-tni-dan-kkb-papua-yang-tak-kunjung-usai>

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu alasan diungkapkannya *sustainability report* oleh perusahaan (Rohim & Syurmita, 2015). *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Penerapan GCG dinilai dapat menciptakan pola pikir kerja manajemen yang transparan dan profesional serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. GCG itu sendiri diharapkan tidak hanya berfokus pada manfaat yang akan diberikan kepada manajemen dan karyawan perusahaan saja, tetapi juga untuk *stakeholders*, konsumen, pemasok, pemerintah dan lingkungan masyarakat yang terkait dengan perusahaan tersebut (Gerged, 2021). Maka dari itu, GCG menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* di dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, GCG diukur dengan *Board Independence*, *Audit Committee* dan *Managerial Ownership*.

Board Independence atau Komisaris Independen adalah anggota dari dewan komisaris tetapi tidak memiliki hubungan terafiliasi mulai dari keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan. Adanya komisaris independen yang bersifat netral dapat menjadikan perusahaan lebih adil dan bertanggung jawab kepada para *stakeholder* (Al Amosh & Khatib, 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adel et al., 2019) dan (Gold & Taib, 2022) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability*

Reporting. Sedangkan hasil penelitian (Jamil et al., 2021) dan (O. A. Erin et al., 2022) membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting*.

Audit Committee atau Komite Audit adalah panitia yang diciptakan oleh jajaran komisaris yang memiliki fungsi mengawasi jalannya perusahaan. Hal ini menjadi salah satu alasan penting dalam pengungkapan *sustainability report* karena komite audit dapat memahami pengungkapan apa saja yang dibutuhkan oleh *stakeholder* (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Buallay & Al-Ajmi, 2020) dan (Madi et al., 2014) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting*. Sedangkan hasil penelitian (Madona & Khafid, 2020) dan (Wantites & Immanuela, 2021) membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh dewan komite audit terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting*.

Managerial Ownership atau Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Hal ini mengindikasikan bahwasanya adanya kepemilikan saham manajemen mengakibatkan para manajer lebih selektif dalam mengambil keputusan dan perlu mempertimbangkan banyak hal karena secara tidak langsung manajemen mendapatkan manfaat dari keputusan yang diambil (Aziz, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan et al., 2018) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting*. Sedangkan hasil penelitian (Latifah

et al., 2019) dan (Nawawi et al., 2020) membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting*.

Penelitian ini merupakan gabungan dan modifikasi penelitian (Tran et al., 2021) dan (O. Erin et al., 2021). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian (Tran et al., 2021) yaitu, dependen penelitian ini menggunakan pengukuran *Sustainability Reporting* berdasarkan *United Nations Sustainable Development Goals* (UN_SDGs) yang menggunakan topic pengungkapan dari *Global Reporting Initiative* (GRI) dan sistem penilaian yang diterbitkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *Corporate Sustainability Disclosure* dengan pengukuran *score index* yang dikembangkan dari penelitian Branco and Rodrigues (2008). Sedangkan hal yang membedakan dengan penelitian (O. Erin et al., 2021) adalah fokus penelitian ini hanya pada perusahaan publik di Indonesia berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan publik di Nigeria Stock Exchange.

Kontribusi penelitian ini yaitu penelitian sejenis masih sangat terbatas di Indonesia sehingga bisa mengisi *research gap* mengenai Pengaruh *Board Independence*, *Audit Committee*, dan *Managerial Ownership* terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs. Kedua, Penelitian ini menggunakan *Sustainable Development Goals* sebagai

pengukuran keberlanjutan perusahaan karena secara khusus, Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), telah menyarankan UN_SDGs untuk manajemen strategis perusahaan agar dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Tsalis et al., 2020).

Dari paparan analisa diatas peneliti memiliki ketertarikan dalam penelitian terkait pengungkapan *sustainability report* yang diukur dengan SDGs. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijadikan pembuktian bahwasanya pengungkapan *sustainability report* bisa memberikan hal-hal yang baik bagi perusahaan. Pada penelitian kali ini peneliti mencoba menguji beberapa indicator GCG dengan pengungkapan *Sustainability Reporting*. Oleh sebab itu penelitimemilih judul penelitian **“Pengaruh Board Independence, Audit Committee,dan Managerial Ownership terhadap Sustainability Reporting berdasarkan United Nations Sustainable Development Goals (UN_SDGs)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Para investor dan pemangku kepentingan telah mendorong perusahaan untuk mengungkapkan transparansi dari laporan keberlanjutannya sebagai upaya untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan, diperlukan transparansi *Sustainability reporting* yang berkualitas. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu keterbukaan informasi yang dituntut investor. Selain itu, tekanan dari *corporate governance* juga

diduga dapat mendorong pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya ketidak transparansian *sustainability report* yang menyebabkan kurangnya kepercayaan dari para investor serta masyarakat.
2. Adanya perusahaan yang masih belum mengeluarkan *sustainability report*.
3. Adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak stabil mengenai *corporate governance* dan *sustainability report*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijabarkan di atas untuk meminimalisir masalah mengenai *Sustainability Reporting* yang diukur dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar tidak meluas dan fokus pada penelitian. Oleh sebab itu, membatasi penelitian ini pada analisis GCG yang diproses dengan *Board Independence*, *Audit Committee*, dan *Managerial Ownership* terhadap *Sustainability Reporting* pada perusahaan publik di Indonesia berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditemukan berdasarkan penjelasan latar

belakang diatas yaitu:

1. Apakah *Board Independence* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs?
2. Apakah *Audit Committee* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs?
3. Apakah *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh *Board Independence* terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs.
2. Pengaruh *Audit Committee* terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs.
3. Pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat dijadikan sebagai bahan tumpuan bagi peneliti lainnya untuk melakukan *research* selanjutnya berhubungan kaitannya dengan analisis *Sustainability Reporting*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bukti pengaruh *Board Independence*, *Audit Committee*, dan *Managerial Ownership* terhadap *Sustainability Reporting* berdasarkan UN_SDGs sehingga manajemen serta investor dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat bisnisnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi regulator dalam membuat kebijakan untuk membuat perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungan, sosial demi menciptakan keberlanjutan perusahaan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Komponen lain yang dijelaskan dalam bab ini yaitu identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan

digunakan oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab yang berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian ini akan dilakukan secara operasional. Data-data pada penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, definisi operasional dari variabel penelitian, sampel penelitian, serta jenis dan sumber data dan juga metode pengumpulan data maupun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai metode-metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian-penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rumusan dari analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya.